



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 54 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 80
TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PEMUKIMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 80 Tahun 2017 telah diatur mengenai analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Utara;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Utara, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 80 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;

14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 80 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 80 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 80), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 5A, yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai prasyarat untuk menyusun peta jabatan, uraian jabatan, serta jumlah kebutuhan PNS.
- (2) Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

No.	N A M A	J A B A T A N	P A R A F
1	Dr. H. SURIANSYAH, M.AP	SEKRETARIS DAERAH	
2	Drs. H. ZAINUDDIN H2, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	ARMAN JAUHARI, SH	PLT. KARD HUKUM	
4	Drs. H. ABDUL MAJID S, MSI	KARD ORGANISASI	

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 54

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 54

No.	N A M A	J A B A T A N	P A R A F
1	Drs. H. ZAIHUDDIN HZ, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
2	ARMAN JAUHARI, SH	PLt. KARD HUKUM	
3	Drs. H. ABDUL MADJID S, M. Si	KARD ORGANISASI	

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 54 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR
80 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
KERJA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO.	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Kepala Dinas	1					
	1. Sekretaris		1				
	a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian			1			
	1) Pengadministrasi Umum				5		
	2) Pengadministrasi Kepegawaian				2		
	3) Pengemudi				2		
	4) Petugas Keamanan				4		
	5) Analis Kerjasama Teknis Standardisa				1		
	6) Analis Barang Milik Negara				2		
	7) Operator Speedboat				6		
	b. Kepala Sub Perencanaan			1			
	1) Analis Data dan Informasi				2		
	2) Pengadministrasi Perencanaan dan Program				2		
	3) Analis Perencanaan				1		
	4) Analis Pembangunan				1		

	c. Kepala Sub Bagian Keuangan			1		
	1) Verifikator Keuangan				2	
	2) Analis Pengelolaan Keuangan				2	
	3) Pengadministrasi Keuangan				2	
	4) Bendahara				1	
	2. Kepala Bidang Sumber Daya Air		1			
	a. Kepala Seksi Irigasi, Sungai dan Air Rawa			1		
	1) Pemeriksa Irigasi				3	
	2) Pengelola Pengairan				3	
	3) Pengelola Sumber Daya Air				1	
	4) Pranata Daerah Aliran Sungai				2	
	b. Kepala Seksi Operasional dan Pemeliharaan			1		
	1) Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air				1	
	2) Penjaga Pintu Air				1	
	3) Analis Data dan Informasi				1	
	c. Kepala Seksi Pantai dan Air Baku			1		
	1) Analis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup				2	
	2) Analis Sumber Daya Air				1	
	3) Analis Pengelolaan Sumber Daya Air				1	
	3. Kepala Bidang Bina Marga		1			
	a. Kepala Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan			1		
	1) Analis Jalan Jembatan				2	
	2) Analis Sistem Jaringan Jalan Jembatan				2	
	3) Analis Data dan Informasi				1	
	b. Kepala Seksi Jalan			1		
	1) Pemelihara Jalan				2	
	2) Penelaah Pengelolaan Leger Jalan				1	
	3) Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan				2	
	4) Pengawas Jalan dan Jembatan				3	
	c. Kepala Seksi Jembatan dan Bangunan Pelengkap			1		

	1) Pengelola Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan				3		
	2) Pengawas Jalan dan Jembatan				2		
	3) Analis Jalan dan Jembatan				1		
	4. Kepala Bidang Cipta Karya		1				
	a. Kepala Seksi Penataan Bangunan			1			
	1) Penata Bangunan Gedung dan Permukiman				3		
	2) Pemelihara Bangunan				1		
	3) Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan				3		
	4) Pengelola Perencanaan Teknis Tata Bangunan				2		
	b. Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman			1			
	1) Analis Penataan Kawasan				2		
	2) Analis Bangunan Gedung dan Permukiman				3		
	3) Analis Data dan Informasi				1		
	c. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan, Sanitasi dan Air Minum			1			
	1) Analis Pengelolaan Sumber Daya Air				2		
	2) Penelaah Penyehatan Lingkungan Permukiman				1		
	3) Pemeriksa Sanitasi				1		
	5. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan		1				
	a. Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang			1			
	1) Analis Tata Ruang				2		
	2) Penyusun Rencana Tata Ruang				2		
	3) Analis Data dan Informasi				1		
	b. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang			1			
	1) Analis Pemanfaatan Ruang				1		
	2) Teknisi Pemetaan dan Penggambaran				2		
	c. Kepala Seksi Pertanahan			1			
	1) Analis Pertanahan				2		
	2) Analis Peta Wilayah				3		
	6. Kepala Bidang Perumahan		1				

	a. Kepala Seksi Perencanaan dan Pendataan Perumahan			1			
	1) Analis Perencanaan Wilayah Perumahan				3		
	2) Pengelola Rencana Pekerjaan Umum dan Perumahan				1		
	3) Analis Data dan Informasi				1		
	b. Kepala Seksi Peningkatan Perumahan			1			
	1) Analis Perumahan				2		
	2) Pengelola Rencana Pekerjaan Umum dan Perumahan				1		
	c. Kepala Seksi Pembangunan Perumahan			1			
	1) Analis Bangunan dan Perumahan				3		
	2) Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan				2		
	7. Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi		1				
	a. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi			1			
	1) Pengelola Jasa Konstruksi				2		
	2) Analis Data dan Informasi				1		
	3) Penelaah Mutu Konstruksi				2		
	b. Kepala Seksi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi			1			
	1) Analis Teknik dan Materi				2		
	2) Operator Alat Berat				1		
	3) Penelaah Mutu Konstruksi				1		
	4) Pengelola Teknik Konstruksi Berkelanjutan				1		
	c. Kepala Seksi Pengembangan Jasa Konstruksi			1			
	1) Penguji Bahan dan Bangunan				1		
	2) Penguji Laboratorium Tanah Aspal dan Beton				1		
	8. Jabatan Fungsional Tertentu						
	a. JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama					5	
	b. JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda					1	

	c. JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Madya					1	
	d. JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Utama					1	
	e. JF Pranata Komputer Pertama					1	
	f. JF Pranata Komputer Muda					1	
	g. JF Pranata Komputer Madya					1	
	h. JF Pranata Komputer Utama					1	
	i. JF Surveyor Pemetaan Pertama					1	
	j. JF Surveyor Pemetaan Muda					1	
	k. JF Surveyor Pemetaan Madya					1	
	l. JF Surveyor Pemetaan Pelaksana					1	
	m. JF Surveyor Pemetaan Pelaksana Lanjutan					1	
	n. JF Surveyor Pemetaan Penyedia					1	
	Jumlah	1	7	21	127	18	
	Jumlah Total			174			

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE




c.	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Madya					1	
d.	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Utama					1	
e.	JF Pranata Komputer Pertama					1	
f.	JF Pranata Komputer Muda					1	
g.	JF Pranata Komputer Madya					1	
h.	JF Pranata Komputer Utama					1	
i.	JF Surveyor Pemetaan Pertama					1	
j.	JF Surveyor Pemetaan Muda					1	
k.	JF Surveyor Pemetaan Madya					1	
l.	JF Surveyor Pemetaan Pelaksana					1	
m.	JF Surveyor Pemetaan Pelaksana Lanjutan					1	
n.	JF Surveyor Pemetaan Penyedia					1	
Jumlah		1	7	21	127	18	
Jumlah Total				174			

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

No	N A M A	JABATAN	PARAF
1	Dr.H.SURIANSYAH, M.AP	SEKRETARIS DAERAH	
2	DRS.H.ZAHUDDIN H2, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	ARMAN JAUHARI, SH	PLT. KARO HUKUM	
4	DRS.H.ABDUL MAQJID S, M.Si	KARO ORGANISASI	

	c. JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Madya					1	
	d. JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Utama					1	
	e. JF Pranata Komputer Pertama					1	
	f. JF Pranata Komputer Muda					1	
	g. JF Pranata Komputer Madya					1	
	h. JF Pranata Komputer Utama					1	
	i. JF Surveyor Pemetaan Pertama					1	
	j. JF Surveyor Pemetaan Muda					1	
	k. JF Surveyor Pemetaan Madya					1	
	l. JF Surveyor Pemetaan Pelaksana					1	
	m. JF Surveyor Pemetaan Pelaksana Lanjutan					1	
	n. JF Surveyor Pemetaan Penyedia					1	
	Jumlah	1	7	21	127	18	
	Jumlah Total			174			

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

c.	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Madya					1	
d.	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Utama					1	
e.	JF Pranata Komputer Pertama					1	
f.	JF Pranata Komputer Muda					1	
g.	JF Pranata Komputer Madya					1	
h.	JF Pranata Komputer Utama					1	
i.	JF Surveyor Pemetaan Pertama					1	
j.	JF Surveyor Pemetaan Muda					1	
k.	JF Surveyor Pemetaan Madya					1	
l.	JF Surveyor Pemetaan Pelaksana					1	
m.	JF Surveyor Pemetaan Pelaksana Lanjutan					1	
n.	JF Surveyor Pemetaan Penyedia					1	
Jumlah		1	7	21	127	18	
Jumlah Total				174			

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd



IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

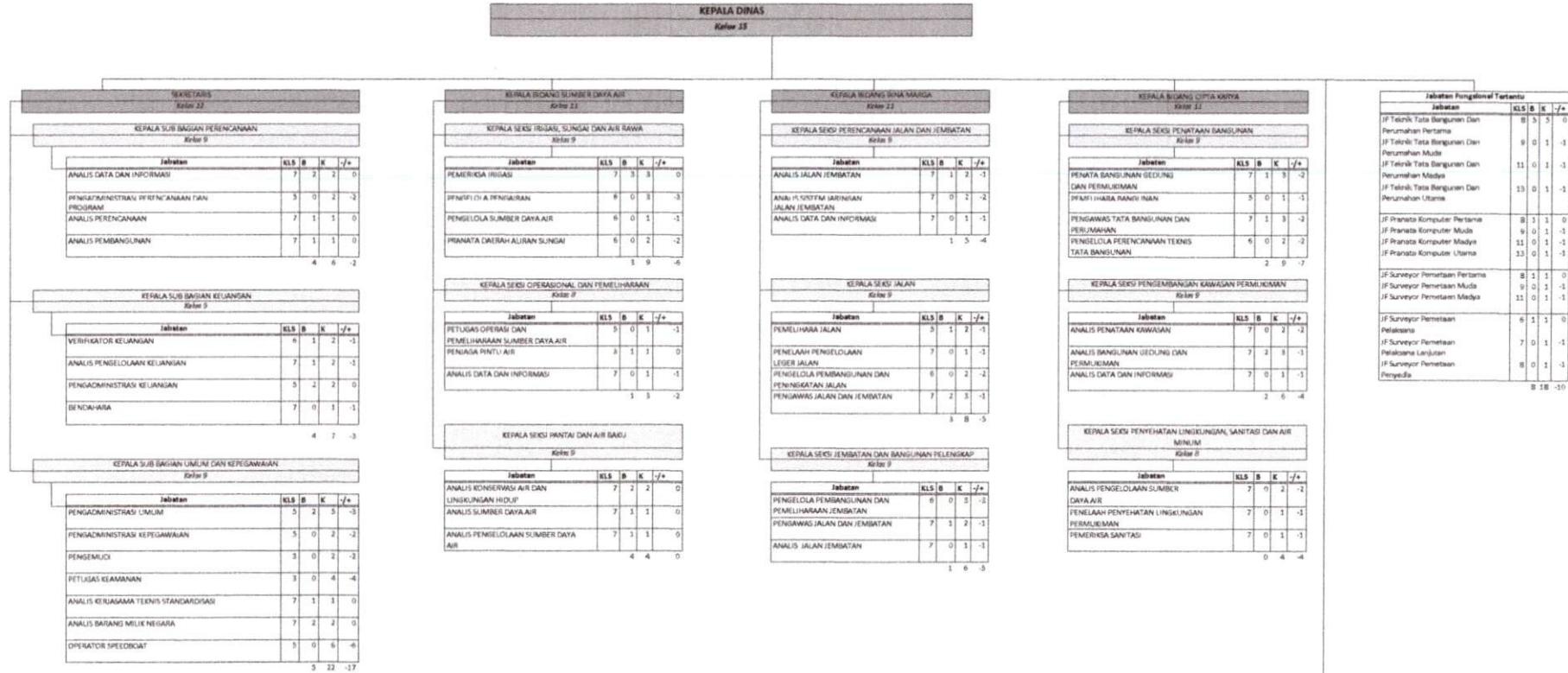


SURIANSYAH

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs.H.ZAINUDDIN H2, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
2	ARMAN JAUHARI, SH	PLT. KARO HUKUM	
3	Drs. H. ABDUL MADJID S, KARO ORGANISASI M. SI		

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 54 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 80 TAHUN 2017
 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM,
 PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

PETA JABATAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN



Rekapitulasi	Jumlah		
	B	K	-/+
Eselon II	1	1	0
Eselon III	7	7	0
Eselon IV	18	21	-3
ST	8	18	-10
SU	39	127	-88
Pulang	73	174	-101

KEPALA BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN				
Kelas II				
KEPALA SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG				
Kelas II				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
ANALIS TATA RUANG	7	2	2	0
PENYUSUN RENCANA TATA RUANG	7	0	2	-2
ANALIS DATA DAN INFORMASI	7	0	1	-1
		2	5	-3
KEPALA SEKSI PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN RUANG				
Kelas II				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
ANALIS PEMANFAATAN RUANG	7	1	1	0
TEKNIK PEMETAAN DAN PENGAMBARAN	6	1	2	-1
		2	3	-1
KEPALA SEKSI PERTANAHAN				
Kelas II				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
ANALIS PERTANAHAN	7	1	2	-1
ANALIS PETA WILAYAH	7	2	3	-1
		3	5	-2

KEPALA BIDANG PERUMAHAN				
Kelas II				
KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PENDATAAN PERUMAHAN				
Kelas II				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
ANALIS PERENCANAAN WILAYAH PERUMAHAN	7	0	3	-3
PENGELOLA RENCANA PEKERJAAN LUMUM DAN PERUMAHAN	6	0	1	-1
ANALIS DATA DAN INFORMASI	7	0	1	-1
		0	5	-5
KEPALA SEKSI PENINGKATAN PERUMAHAN				
Kelas II				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
ANALIS PERUMAHAN	7	0	2	-2
PENGELOLA RENCANA PEKERJAAN LUMUM DAN PERUMAHAN	6	0	1	-1
		0	3	-3
KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN PERUMAHAN				
Kelas II				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
ANALIS BANGUNAN DAN PERUMAHAN	7	0	3	-3
PENGAWAS TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	7	1	2	-1
		1	5	-4

KEPALA BIDANG BINA JASA KONSTRUKSI				
Kelas II				
KEPALA SEKSI KELEMBAGAN DAN SUMBER DAYA JASA KONSTRUKSI				
Kelas II				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
PENGELOLA JASA KONSTRUKSI	6	0	2	-2
ANALIS DATA DAN INFORMASI	7	0	1	-1
PENELAHAH MUTU KONSTRUKSI	7	0	2	-2
		0	5	-5
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN JASA KONSTRUKSI				
Kelas II				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
ANALIS TEKNIK DAN MATERI	7	0	2	-2
OPERATOR ALAT BERAT	5	0	1	-1
PENELAHAH MUTU KONSTRUKSI	7	1	1	0
PENGELOLA TEKNIK KONSTRUKSI BERKELANJUTAN	6	0	1	-1
		1	5	-4
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN JASA KONSTRUKSI				
Kelas II				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
PENGULI SAHAN DAN BANGUNAN	7	0	1	-1
PENGULI LABORATORIUM TANAH ASPAL DAN BETON	7	0	1	-1
		0	2	-2

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

Rentangulasi	Jumlah		
	B	K	-/+
Ekselon II	1	1	0
Ekselon III	7	7	0
Ekselon IV	18	21	-3
PT	8	18	-10
PLU	39	127	-88
Purang	73	174	-101

KEPALA BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN Kelas II				
KEPALA SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG Kelas III				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
ANALIS TATA RUANG	7	2	2	0
PENYUSUN RENCANA TATA RUANG	7	0	2	-2
ANALIS DATA DAN INFORMASI	7	0	1	-1
		2	5	-3
KEPALA SEKSI PEMANFAATAN DAN PENGELOMPOKAN RUANG Kelas III				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
ANALIS PEMANFAATAN RUANG	7	1	1	0
TEKNIK PEMETAAN DAN PENGAMBARAN	6	1	1	-1
		2	3	-1
KEPALA SEKSI PERTANAHAN Kelas III				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
ANALIS PERTANAHAN	7	1	2	-1
ANALIS PETA WILAYAH	7	2	3	-1
		3	5	-2




KEPALA BIDANG PERUMAHAN Kelas II				
KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PENDAFTARAN PERUMAHAN Kelas III				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
ANALIS PERENCANAAN WILAYAH PERUMAHAN	7	0	3	-3
PENGELOLA RENCANA PEKERJAAN LUMUM DAN PERUMAHAN	6	0	1	-1
ANALIS DATA DAN INFORMASI	7	0	1	-1
		0	5	-5
KEPALA SEKSI PENYIDIKTAN PERUMAHAN Kelas III				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
ANALIS PERUMAHAN	7	0	2	-2
PENGELOLA RENCANA PEKERJAAN LUMUM DAN PERUMAHAN	6	0	1	-1
		0	3	-3
KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN PERUMAHAN Kelas III				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
ANALIS BANGUNAN DAN PERUMAHAN	7	0	3	-3
PENGELOLA TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	7	1	1	-1
		1	5	-4

KEPALA BIDANG JASA KONSTRUKSI Kelas II				
KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA JASA KONSTRUKSI Kelas III				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
PENGELOLA JASA KONSTRUKSI	6	0	2	-2
ANALIS DATA DAN INFORMASI	7	0	1	-1
PENYELAAH MUTU KONSTRUKSI	7	0	2	-2
		0	5	-5
KEPALA SEKSI PENYELENGKAPAN JASA KONSTRUKSI Kelas III				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
ANALIS TEKNIK DAN MATERI	7	0	2	-2
OPERATOR ALAT BERAT	5	0	1	-1
PENYELAAH MUTU KONSTRUKSI	7	1	1	0
PENGELOLA TEKNIK KONSTRUKSI BERKELANJUTAN	6	0	1	-1
		1	5	-4
KEPALA SEKSI PENGELOMPOKAN JASA KONSTRUKSI Kelas III				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
PENELITIAN BAHAN DAN BANGUNAN	7	0	1	-1
PENGLIJI LABORATORIUM TANAH ASPAL DAN BETON	7	0	1	-1
		0	2	-2

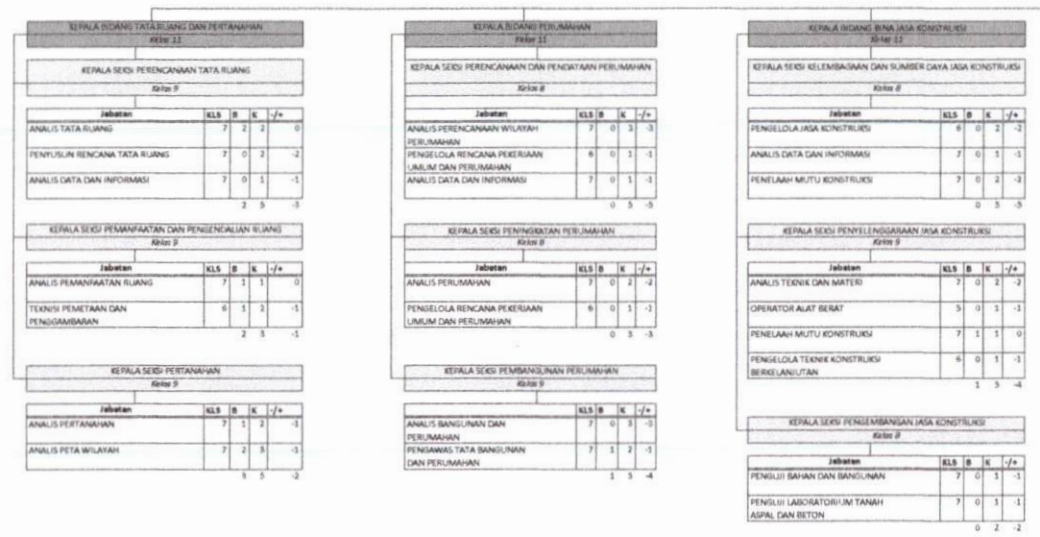
Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

No.	NAMA	JABATAN	PIRAT
1	DR. H. SURIANSYAH, M.AP	SEKRETARIS DAERAH	
2	DRS. H. ZAINUDDIN H2, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	ARMAN JAUHARI, SH	PLT. KARO HUKUM	
4	DRS. H. ABDUL MAJID S, M.Si	KARO ORGANISASI	

Kategori	Jumlah		
	B	K	-/+
Eselon II	1	1	0
Eselon III	7	7	0
Eselon IV	18	21	-3
ST	3	18	-15
BLU	29	127	-98
Pulang	73	174	-101



Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR

Rata-rata	Jumlah		
	B	K	/+
Badan II	1	3	0
Badan III	7	7	0
Badan IV	18	23	-3
PT	8	18	-10
PLU	39	127	-88
Pulang	75	174	-99

KEPALA BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN				
Kriteria 11				
KEPALA SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG				
Kriteria 9				
Jabatan	KLS	B	K	/+
ANALIS TATA RUANG	7	2	2	0
PENYUSUN RENCANA TATA RUANG	7	0	2	-2
ANALIS DATA DAN INFORMASI	7	0	1	-1
		2	5	-3
KEPALA SEKSI PEMANFAATAN DAN PENGENDEALIAN RUANG				
Kriteria 9				
Jabatan	KLS	B	K	/+
ANALIS PEMANFAATAN RUANG	7	1	1	0
TEKNIK PEMETAAN DAN PENGAMBARAN	6	1	3	-1
		2	5	-3
KEPALA SEKSI PERTANAHAN				
Kriteria 9				
Jabatan	KLS	B	K	/+
ANALIS PERTANAHAN	7	1	2	-1
ANALIS PETA WILAYAH	7	2	3	-1
		3	5	-2

KEPALA BIDANG PERUMAHAN				
Kriteria 21				
KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN POKOKAN PERUMAHAN				
Kriteria 8				
Jabatan	KLS	B	K	/+
ANALIS PERENCANAAN WILAYAH PERUMAHAN	7	0	3	-3
PENGELOLA RENCANA PEKERJAAN LUMUM DAN PERUMAHAN	6	0	1	-1
ANALIS DATA DAN INFORMASI	7	0	1	-1
		0	5	-5
KEPALA SEKSI PENINGKATAN PERUMAHAN				
Kriteria 8				
Jabatan	KLS	B	K	/+
ANALIS PERUMAHAN	7	0	2	-2
PENGELOLA RENCANA PEKERJAAN LUMUM DAN PERUMAHAN	6	0	1	-1
		0	3	-3
KEPALA SEKSI PEMANUSULAN PERUMAHAN				
Kriteria 9				
Jabatan	KLS	B	K	/+
ANALIS BANGUNAN DAN PERUMAHAN	7	0	3	-3
PENGAWAS TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	7	1	2	-1
		1	5	-4

KEPALA BIDANG BINA JASA KONSTRUKSI				
Kriteria 13				
KEPALA SEKSI KELEMBAGAN DAN SUMBER DAYA JASA KONSTRUKSI				
Kriteria 8				
Jabatan	KLS	B	K	/+
PENGELOLA JASA KONSTRUKSI	6	0	2	-2
ANALIS DATA DAN INFORMASI	7	0	1	-1
PENELAHAH MUTU KONSTRUKSI	7	0	2	-2
		0	5	-5
KEPALA SEKSI PENYELENGSAJIAN JASA KONSTRUKSI				
Kriteria 9				
Jabatan	KLS	B	K	/+
ANALIS TEKNIK DAN METER	7	0	2	-2
OPERATOR ALAT BERAT	5	0	1	-1
PENELAHAH MUTU KONSTRUKSI	7	1	1	0
PENGELOLA TEKNIK KONSTRUKSI BERKELANJUTAN	6	0	1	-1
		1	5	-4
KEPALA SEKSI PENGELOMBANG JASA KONSTRUKSI				
Kriteria 8				
Jabatan	KLS	B	K	/+
PENGULI BAHAN DAN BANGUNAN	7	0	1	-1
PENGULI LABORATORIUM TANAH ASPAL DAN BETON	7	0	1	-1
		0	2	-2

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 17 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,


SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 54

No	NAMA	JABATAN
1	Drs. H. ZAIMUDDIN H2, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
2	ARMAN JAUHARI, SH	PLT. KARO HUKUM
3	Drs. H. ABDUL MADJID S, M.Si	KARO ORGANISASI